

LAPORAN
DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA MENGHADIRI
THE 5th CONFERENCE OF THE GLOBAL ORGANIZATION OF PARLIAMENTARIANS
AGAINST CORRUPTION (GOPAC)
MANILA – FILIPINA, 30 JANUARI 2013 – 2 FEBRUARI 2013

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pengiriman Delegasi

Dasar pengiriman Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke *The 5th Conference of the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* yang diselenggarakan tanggal 29 Januari 2013 – 3 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

1. Surat Undangan tanggal Juli 2012 dari Ketua Senat Filipina, HE Mr. Juan Ponce Enrille, selaku tuan rumah kepada Ketua DPR-RI
2. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 57/PIM/III/2012-2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pengiriman Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Menghadiri *The 5th Conference of the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* dari tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013

B. Susunan Delegasi

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 57/PIM/III/2012-2013 tanggal 21 Januari 2013, Delegasi DPR-RI ke Konferensi ke-5 GOPAC terdiri dari 5 orang yaitu:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. H. Hayono Isman, SIP | -Fraksi Partai Demokrat/A-450 |
| 2. H. Dito Ganinduto, MBA | -Fraksi Partai Golkar/A-229 |
| 3. Yahdil Abdi Harahap, SH, MH | -Fraksi Partai Amanat Nasional/A-103 |
| 4. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE | -Fraksi Partai DI Perjuangan/A-386 |
| 5. Fahri Hamzah, SE | -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/A-95 |

C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dari Pengiriman Delegasi DPR-RI ke Konferensi ke-5 GOPAC adalah

- a. Berpartisipasi aktif dalam GOPAC yang merupakan satu-satunya organisasi parlemen/jaringan internasional antar anggota parlemen dengan tujuan tunggal memberantas korupsi diseluruh dunia, melalui tercapainya pemerintahan yang baik dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dimiliki parlemen

- b. Membentuk *National Chapter Indonesia* yaitu Kelompok Anggota DPR-RI yang peduli pada gerakan anti korupsi di tingkat nasional dan berperan aktif pada Regional Chapter GOPAC yaitu *South East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC)*.

Sedangkan tujuan dari pengiriman Delegasi DPR-RI ke Konferensi ke-5 GOPAC antara lain sebagai berikut:

- a. Mempresentasikan Indonesia kepada dunia internasional melalui forum GOPAC tentang program dan hasil yang telah dicapai Indonesia di bidang pemberantasan korupsi
- b. Meningkatkan citra positif Indonesia di mata masyarakat internasional, khususnya melalui pendekatan anti-korupsi
- c. Mensosialisasikan hasil workshop dengan tema Keterlibatan Anggota Parlemen Dalam Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 12 Nopember 2012, antara lain *Declaration of the Establishment of the Global Organizations of Parliamentarians against Corruption Indonesia National Chapter*

D. Misi Delegasi

Misi dari pengiriman Delegasi DPR-RI ke Konferensi ke-5 GOPAC antara lain sebagai berikut:

- a. Mempresentasikan Laporan Penyelenggaraan Workshop dengan tema keterlibatan anggota parlemen dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi dan Pembentukan Gugus Tugas Nasional GOPAC/SEAPAC yang diselenggarakan tanggal 12 Desember 2012 di Jakarta
- b. Memperjuangkan kepentingan nasional terkait dengan isu korupsi di forum GOPAC/SEAPAC
- c. Memfasilitasi Delegasi DPR-RI untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman serta memperluas jaringan kerja dengan para peserta GOPAC lainnya

E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan

Sebelum keberangkatan ke Konferensi dimaksud, Delegasi DPR-RI melakukan persiapan administrasi, teknis dan substansi. Persiapan administrasi berupa surat menyurat dan koordinasi dengan instansi terkait, penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Dewan, Surat Perjalanan Dinas, Faktur dll. Persiapan teknis berupa penyusunan jadwal perjalanan dan akomodasi delegasi, koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait seperti KEMLU RI, KBRI, Panitia Penyelenggara, dll. Persiapan substansi berupa penyiapan statement, points of intervention, presentasi, dll termasuk rapat-rapat persiapan materi/substansi dengan instansi terkait seperti KEMLU RI dan Kementerian Hukum dan HAM.

II. ISI LAPORAN

A. Uraian tentang situasi umum Konferensi

Konferensi ke-5 GOPAC, yang mengambil tema *Good Leaders, Good Laws, and Good Citizens*, merupakan suatu wadah pertemuan bagi anggota parlemen dari berbagai negara, akademisi dan praktisi untuk mendiskusikan upaya dan kebijakan untuk memberantas korupsi. Ada 4 topik yang menjadi fokus pembahasan dalam konferensi ini, yaitu

peningkatan peran parlemen dalam pengawasan pelayanan publik, Anti *Money Laundering*, Kode Etik Anggota Parlemen, dan Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Konferensi ini telah menjadi forum bagi para anggota parlemen untuk berbagai pengalaman, ilmu, diskusi serta wacana yang sangat baik dalam memperkuat relasi antar negara serta *peer support* dalam rangka menyukkseskan program pemberantasan korupsi di tingkat global.

Pada penutupan Konferensi, GOPAC akan menyetujui Deklarasi Manila dan mengadopsi 5 Resolusi yaitu Resolusi *Anti-Money Laundering GTF*, Resolusi *Women in Parliament Network GTF*, Resolusi *UN Convention Against Corruption GTF*, Resolusi *Parliamentary Oversight GTF* dan Resolusi *Participation of Civil Society GTF*. Selain itu, GOPAC akan menetapkan Ketua GOPAC yang baru untuk jangka waktu 2 tahun dan menetapkan tempat penyelenggaraan Konferensi ke-6 GOPAC, penetapan Ketua-Ketua Regional Chapter (SEAPAC, SAPAC, ARPAC, African Forum, GOPAC) serta agenda lainnya yang telah disepakati.

B. Agenda Konferensi yang dibahas

The 5th Conference of the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) mengambil tema “*Good Leaders, Good Laws, Good Citizens*” dan membahas agenda konferensi sebagai berikut:

- *Effective Implementation on the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*
- *Parliamentary Oversight and the Role of Good Audit in the Fight Against Corruption – using evidence to enforce anti-corruption laws*
- *Anti-Money Laundering Laws v.s. Bank Secrecy*
- *The Right to Information and Civil Society Participation in the Fight Against, and Prevention of Corruption*
- *Transparency in Public Procurement with Business and Civil Society Oversight*
- *Parliamentary Ethic and Conduct*
- *Role of Women Parliamentarians & the GOPAC Women Network*
- *Human Capital, Social Capital and Institutions*

Adapun *Program of Conference* GOPAC selengkapnya sebagai berikut:

Rabu, 30 Januari 2013

		Global Task Forces (GTF) pre-conference meetings
09.00 – 10.30	:	Anti-Money Laundering GTF Parliamentary Ethics & Conduct GTF Women in Parliament Network GTF
10.30 – 12.00	:	UN Convention Against Corruption GTF Parliamentary Oversight GTF Participation of Civil Society GTF
12.30	:	Executive Board Meeting
16.00	:	GOPAC Board Meeting –Election of the new Executive Committee
18.00	:	Welcome Reception by Senator Edgardo J. Angara GOPAC Vice Chairman & SEAPAC President

Kamis, 31 Januari 2013

- 07.00 : Registration
- 09.00 – 11.30 : Opening Ceremony
-National Anthem
-Welcome Address by Senate President Juan Ponce Enrille
-Welcome Address by House Speaker Feliciano Belmonte Jr.
-Address by GOPAC Chair Hon. Dr. Naser Al Sane
-Opening Address by Senator Edgardo J. Angara
-Keynote Speech of the President, HE Benigno S Aquino III
-Report by the GOPAC CEO Mr. John G. Williams
- 11.30 – 13.00 : Lunch Reception by Senate President Juan Ponce Enrille
- 13.00 – 15.00 : GOPAC Manila 2013 –Session 1
Effective Implementation on the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
- 15.00 – 17.00 : GOPAC Manila 2013 –Session 2
Parliamentary Oversight and the Role of Good Audit in the Fight Against Corruption –using evidence to enforce anti-corruption laws
- 17.00 – 18.30 : GOPAC Manila 2013 –Session 3
Anti-Money Laundering Laws v.s. Bank Secrecy
- 19.30 : Dinner Reception by Department of Tourism

Jum'at, 1 Februari 2013

- 09.00 -11.30 : GOPAC Manila 2013 –Session 4
The Right to Information and Civil Society Participation in the Fight Against, and Prevention of Corruption
GOPAC Manila 2013 –Session 5
Transparency in Public Procurement with Business and Civil Society Oversight
- 11.30 -13.00 : Lunch Reception by House Speaker Feliciano Belmonte Jr.
- 13.00 -15.00 : GOPAC Manila 2013 –Session 6
Parliamentary Ethic and Conduct
GOPAC Manila 2013 –Session 7
Role of Women Parliamentarians & the GOPAC Women Network Special Session
Human Capital, Social Capital and Institutions
- 15.00-18.00 : GOPAC Regional Chapter Meetings
-African Forum
-ARPAC (Arab Region Parliamentarians Against Corruption)
-GOPAC Latina America y el Caribe
-SAPAC (South Asian Parliamentarians Against Corruption)
-SEAPAC (South East Asian Parliamentarians Against Corruption)
-GOPAC Members Non-Affiliated to Regional Chapters
- 19.00 : Embassy Night

Sabtu, 2 Februari 2013

- 09.00 – 10.00 : Plenary Session
-GOPAC Regional Reports and Future Plans
-MOU Signing between GOPAC and International Anti-Corruption Academy (IACA)
- 10.00 – 11.30 : Closing Ceremony
-Presentation and Adoption of GTF Resolutions
-Presentation of Manila Declaration
-Closing Remarks by Outgoing Chair, Dr. Naser Al-Sane
-Closing Remarks by the New GOPAC Chair
-Announcement of 2015 Conference Host
- 11.30 -12.00 : Press Conference
- 12.00 – 14.00 : Lunch Reception by Hon. Leila De Lima, Secretary of the Department of Justice
- 14.00 – 18.00 : GOPAC Meeting of the new Board of Directors

C. Partisipasi Delegasi DPR-RI

Delegasi DPR-RI berpartisipasi dan berperan aktif selama persidangan GOPAC berlangsung sebagai berikut:

Global Task Forces (GTF) pre-conference meetings



*Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE (F-PDIP)
bersama Anggota GTF lainnya*

GTF Pre-Conference Meetings diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2013. Dalam pertemuan tersebut, Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE sebagai anggota tetap *Global Task Force (GTF) Parliamentary Oversight* yang membidangi pengawasan parlemen, mengusulkan agar negara-negara anggota *SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption)* memberikan perhatian khusus pada industri ekstraktif untuk dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu juga mengharapkan agar setiap kontrak industri ekstraktif yang dinegosiasikan antara pemerintah dan sektor swasta dapat disesuaikan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Parlemen perlu berperan aktif dalam fungsi pengawasan industri ekstraktif. Disampaikan pula bahwa Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam hal pemberantasan korupsi, namun yang menjadi tantangan terbesar adalah soal penegakan hukum yang masih lemah.

Opening Ceremony

Upacara Pembukaan Sidang ke-5 GOPAC dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 09.00 bertempat di Philippines International Convention Center, Manila.

Welcome Address disampaikan oleh Ketua Senate Filipina, Senator Juan Ponce Enrille dan Ketua DPR Filipina, HE Feliciano Berlmonte Jr. Sedangkan pidato pembukaan disampaikan oleh Ketua GOPAC, Hon. Dr. Naser Al Sane (Kuwait).



Suasana Upacara Pembukaan Sidang ke-5 GOPAC yang dihadiri oleh Presiden Republik Filipina, H.E. Mr. Benigno S. Aquino III

Sidang secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Filipina, H.E. Mr. Benigno S. Aquino III, dengan menyampaikan *keynote speech* yang antara lain mengingatkan bahwa korupsi merupakan *unforeseen destructive force* karena korupsi memanfaatkan asset sektor publik dan menjual asset tersebut, dengan cara memanipulasi perbankan, secara terang-terangan ke pasar perbankan internasional. Selain itu, diingatkan pula bahwa korupsi telah melanda partai politik dan cepat atau lambat dapat merembet ke institusi parlemen.



Delegasi DPR-RI dipimpin oleh H. Hayono Isman, SIP (F-PD/Wakil Ketua BKSAP) sedang menghadiri Upacara Pembukaan Sidang ke-5 GOPAC

Sidang ke-5 GOPAC dihadiri oleh sekitar 300 orang terdiri dari 12 Ketua Parlemen (Malaysia, Saudi Arabia, Timor Leste, Mesir, Chad, Gabon, Kenya, Maldives, Maroko, Namibia, Botswana) dan para anggota parlemen dari 50 negara anggota GOPAC serta organisasi masyarakat madani tingkat lokal maupun internasional.

Sesi Pertama : *Effective Implementation on the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Sesi Pertama diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2013 dan membahas topik *Effective Implementation of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan tiga orang pembicara yaitu Dimitri Vlassis, *Chief of Corruption, Economic Crime Branch of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, Kamaruddrin Jaffar dari Malaysia, dan Toshihiro Tanaka, *County Director for Pakistan UNDP*. Vlassis menyampaikan bahwa prinsip dasar untuk implementasi UNCAC secara efektif memerlukan penegakan hukum yang kuat, diantaranya sanksi *mandatory offences* bagi setiap pelanggar pasal-pasal UNCAC. Hal yang menjadi kendala untuk penerapan sanksi tersebut adalah minimnya legislasi di masing-masing negara, belum adanya perlindungan memadai bagi saksi dan korban, minimnya provisi dari lembaga kerjasama internasional. Selain itu hal yang menjadi diskusi sentral dalam sesi pertama ini adalah soal pengembalian aset korupsi yang berada di luar batas teritorial suatu negara, misalnya disebabkan oleh praktek *money laundering*. Hal ini masih sulit dinegosiasikan, karena masing-masing negara belum memiliki persepsi yang sama dan kerangka kerjasama atau rezim internasional yang menjadi payung belum terbentuk.

Sedangkan Country Director UNDP untuk Pakistan, Toshihiro Tanaka, menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi haru melibatkan semua pihak terkait (stakeholders), karena korupsi merugikan seluruh lapisan, tidak terkecuali masyarakat sipil. Tanaka juga menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang bersifat *good governance*, karena itu merupakan satu-satunya kunci yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan dalam setiap lini pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa *peer support* dan partisipasi dari anggota parlemen adalah prasyarat mutlak dalam sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi.



H. Hayono Isman, SIP (F-PD/Wakil Ketua BKSAP) selaku Ketua Delegasi DPR-RI menyampaikan Statement pada Sesi Pertama yang membahas tema UNCAC

Dalam kesempatan ini, H. Hayono Isman, SIP (F-PD/A-480) selaku Ketua Delegasi menyampaikan *statement* bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui penetapan UU No. 7 tahun 2006 mengenai pencegahan, kriminalisasi dan kerjasama internasional dalam kerangka pemberantasan korupsi. Ditegaskan bahwa *there is no one size fits all approach*, bahwa seluruh pilar dalam UNCAC harus dilaksanakan oleh semua negara penandatanganan melalui ratifikasi dan implementasi dalam legislasi nasional.

Indonesia sangat mendukung kebijakan preventif seperti pembentukan Badan Anti Korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik dan pemilihan umum, serta memastikan bahwa pelayanan public terhadap masyarakat dilaksanakan secara efisien. Dalam kesempatan ini Hayono Isman mengangkat isu yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, yaitu mengenai pengembalian aset (*asset recovery*), dan mempertanyakan bagaimana upaya Asia dalam mendorong dan menciptakan suatu rezim kawasan untuk menjalankan sistem pengembalian aset tersebut. Disampaikan bahwa upaya pembentukan rezim ini memerlukan peran kepemimpinan yang kuat serta kesadaran bersama negara-negara di kawasan.



H. Hayono Isman, SIP (F-PD/Wakil Ketua BKSAP) selaku Ketua Delegasi DPR-RI menyampaikan Statement pada Sesi Pertama yang membahas tema UNCAC

Sesi Kedua : Parliamentary Oversight and the Role of Good Audit in the Fight Against Corruption-using evidence to enforce anti corruption laws

Sesi Kedua diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2013 dan membahas topik *Parliamentary Oversight and the Role of Good Audit in the Fight Against Corruption-using evidence to enforce anti corruption laws* dengan pembicara yaitu Conchita Carpio-Morales (Ombudsman, Republik Filipina) Prof Peter Loney (*Parliamentary Leadership and*

Governance Group, Deakin University) dan Bryon Wilfert (*Former MP Canada* dan Konsultan Tactix).

Secara umum ketiga pembicara pada sesi kedua menyampaikan bahwa transparansi, akuntabilitas dan tata pemerintahan yang baik adalah prasyarat kunci untuk mencapai pemerintahan yang demokratis dan efektif. Peran *Supreme Audit Institution* sangat sentral dalam memberantas korupsi dan untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan public yang baik dan efisien. Peran lembaga audit tersebut harus bersifat independen dan secara structural terpisah dari parlemen. Namun hasil kerja dari lembaga audit tersebut harus berada dalam pengawasan parlemen sebagai suatu mekanisme pencegahan korupsi dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif korupsi. Mekanisme pengawasan parlemen tersebut dilaksanakan melalui Komite Akuntabilitas Publik (*Public Accounts Committees/PAC*). Bryon Wilfert menyampaikan bahwa penyebab korupsi diantaranya adalah rendahnya kebebasan dan hak sipil, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta tingginya supremasi pemerintah yang memiliki konsekuensi terhadap rendahnya partisipasi publik. Morales dan Wilfert menggarisbawahi bahwa kesuksesan upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada peran *General Auditor dan Public Account Committees*.

Dalam kesempatan ini, Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE (P-PDIP/A-386) menyampaikan pandangannya mengenai kondisi dalam sistem presidensial bahwa Komite Akuntabilitas Publik (PAC) dapat berfungsi dengan baik, dimana masing-masing komite melakukan *follow up* terhadap hasil dari *general auditor*. Peranan parlemen dalam memberikan tekanan kepada lembaga auditor adalah hal yang sangat krusial, sebagai salah satu cara menunjukkan adanya permintaan dan representasi dari rakyat di akar rumput yang disebut sebagai *ground system independent*. Sistem pencegahan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan *top-down*, dari atas PAC harus senantiasa mengawasi dan meminta laporan pertanggungjawaban audit terhadap kinerja pemerintah. Melalui mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja *general auditor* serta dengan demikian juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.



Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE (F-PDIP) sedang menyampaikan pandangan kepada Pembicara

Sesi Ketiga : Anti-Money Laundering Law Vs. Bank Secrecy

Sesi Ketiga diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2013 dan membahas topik *Anti-Money Laundering Law Vs. Bank Secrecy* dengan pembicara yaitu Roy Cullen (*Former Mp Canada dan Board of Director GOPAC*) dan Teresita Herbosa (*Chairperson, Securities and Exchange Commission, Philippines*). Roy Cullen menyampaikan bahwa Pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin efektif jika didukung oleh regime anti pencucian uang yang *robust*. '*Follow the money approach*' merupakan mekanisme yang cukup efektif dalam penanganan pencucian uang yang dapat juga dimanfaatkan dalam upaya *asset tracing, asset recovery* dan upaya anti korupsi secara umum. Ia juga menyampaikan bahwa peran Parlemen sangat penting dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang melalui pembuatan legislasi, mendirikan institusi audit yang transparan, independen dan memiliki sumber daya yang memadai serta memastikan bahwa *Financial Intelligent Units* (FIU) berjalan secara maksimal. Dalam hal prinsip kerahasiaan Bank, Roy Cullen menyarankan

agar masing-masing negara bekerjasama dengan komunitas internasional dalam rangka memonitor aktivitas di negara mereka, selain itu juga untuk memastikan bahwa semua negara tunduk dan patuh terhadap *Anti Money Laundering Law*. Kedua pembicara pada dasarnya menggarisbawahi bahwa diperlukan suatu legal framework dan mutual legal assistance demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam kesempatan ini, Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE (F-PDIP/A-386) menyampaikan pandangannya bahwa pemberantasan praktik pencucian uang membutuhkan adanya *political will* dari semua negara-negara, dan menekankan bahwa aspek penegakan hukum adalah hal yang utama. Ditambahkan bahwa pemberian sanksi yang lebih tegas kepada Bank yang menerima dana yang berasal dari praktik pencucian uang serta tidak memberikan akses data terhadap institusi terkait guna melakukan penyelidikan.

Sesi Keempat dan **Sesi Kelima** berjalan secara parallel yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013.

Sesi Keempat : *The Right to Information and Civil Society Participation in the Fight Against Corruption*

Sesi Keempat membahas topik *The Right to Information and Civil Society Participation in the Fight Against Corruption* dengan pembicara Leila De Lima (*Secretary of Justice*) dan Huguette Labelle (*Chairperson, Transparency International*). Sesi ini membahas transparansi publik dan partisipasi masyarakat sipil. Pasal 13 dari Bab II Konvensi UNCAC memberikan mandat kepada negara pihak untuk mendorong partisipasi masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, maupun masyarakat madani dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Negara-negara juga diminta untuk meningkatkan transparansinya berkenaan dengan kegiatan dan sistem pelaporan publik, selain pula diwajibkan untuk memastikan kemudahan akses informasi bagi publik terkait aktifitas yang dilakukan oleh pejabat publik.

Sesi Kelima: *Transparency in Public Procurement and Business and Civil Society Oversight*

Sesi Kelima membahas topik *Transparencu in Public Procurement and Business and Civil Society Oversight* dengan pembicara terdiri dari Mr. Hamid Sharif (*Country Director, People's Republic of China Resident Mission, Asian Development Bank*) dan Mr. Kyle Wombolt (*Head of Asia Investigations and Compliance Herbert Smith Freehills*).

Sesi ini membahas mengenai pengadaan umum termasuk didalamnya membangun sistem pengadaan yang tepat berdasarkan transparansi, kompetisi dan kriteria obyektif dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam mencegah korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan transparansi dalam pengadaan umum, merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena kegiatan dan kinerja pemerintah dapat diawasi publik secara terbuka. Transparansi dan keterbukaan informasi akan mendukung peningkatan pemahaman publik terhadap kegiatan dan kinerja pemerintah, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap peluang korupsi. Hamid L. Sharif menyampaikan bahwa sector pengadaan public menggunakan dana sebesar 8-20% dari total GDP, ini adalah jumlah yang sangat besar. Penggunaan anggaran GDP yang mengakibatkan

leakage dan *waste* bias mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan public, dimana seharusnya dana tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan kesejahteraan.

Sesi Keenam dan **Sesi Ketujuh** diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2013 dan berlangsung secara paralel.

Sesi Keenam: *Parliamentary Ethics and Conduct*

Sesi Keenam membahas topik *Parliamentary Ethics and Conduct* dengan pembicara Ghassam Moukheiber (Member of Parliament, Lebanon), Mrs. Laura Sanz-Levia (Council of Europe), dan Mr. Scott Hubli (*National Democratic Institute for International Affairs*). Sesi ini mendiskusikan bahwa level kepercayaan public terhadap Parlemen mulai menurun karena banyak insiden korupsi melibatkan MPs, hal ini juga menunjukkan bahwa level integritas mulai menurun di kalangan anggota parlemen. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, keterbukaan dan komitmen para wakil rakyat terhadap negara dan bangsanya. Hal ini telah diinisiasi melalui penerapan etika dan kode etik anggota parlemen. Terkait dengan isu tersebut, GOPAC telah menerbitkan *handbook* mengenai kode etik parlemen, sebagai upaya untuk membentuk sikap dan perilaku anggota parlemen yang demokratis berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.

Sesi Ketujuh : *Role of Women Parliamentarian and the GOPAC Women Network*

Sesi Ketujuh membahas topik *Role of Women Parliamentarian and the GOPAC Women Network* dengan dua orang pembicara yaitu Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (*President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians, IPU*) dan Senator Pia Cayetano (Philippines). Inti diskusi pada Sesi ini adalah bahwa korupsi berimplikasi negatif pada rakyat, yang mana hampir dari setengah populasi dunia adalah wanita. Menurut kedua pembicara, korupsi menyebabkan wanita kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi haruslah melibatkan partisipasi wanita secara luas, mulai dari parlemen, masyarakat sipil hingga organisasi non-pemerintah. Hal ini ditujukan agar dapat meminimalisir dampak negative korupsi terhadap wanita melalui pembantuan serangkaian legislasi yang melindungi wanita serta menyediakan perlindungan bagi saksi. Wanita juga lebih rawan terhadap dampak korupsi, terutama ketika korupsi tersebut berimplikasi sektor kesehatan, apalagi wanita memiliki kebutuhan yang berbeda dari sisi kesehatan, terutama ketika mereka hamil dan melahirkan. Oleh karena itu wanita harus lebih dilibatkan lagi dalam pembuatan kebijakan, sosialisasi dan upaya pemberantasan korupsi.



Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si sebagai Keynote Speaker pada Sesi Ketujuh

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (F-PD/A-515) merupakan Anggota DPR-RI yang diundang sebagai salah satu narasumber di Konferensi GOPAC ini dalam kapasitasnya sebagai *President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians* di IPU untuk menyampaikan peran wanita dalam pemberantasan korupsi.

Dalam paparannya, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, menyatakan bahwa korupsi menyebabkan dampak negatif yang sangat besar pada perempuan. Korupsi menurunkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, kesejahteraan dan ekonomi. Oleh karena itu, parlemen perlu memberi perhatian khusus terhadap persoalan ini, melalui pengusulan Undang-Undang yang dapat melindungi perempuan dari eksekusi negatif korupsi

GOPAC REGIONAL CHAPTER MEETINGS

Pada tanggal 1 Februari 2013 sore diselenggarakan GOPAC Regional Chapter Meetings yang meliputi pertemuan-pertemuan organisasi regional yang dilaksanakan secara parallel yaitu:

- African Forum or the African Parliamentarians' Network Against Corruption (APNAC)
- ARPAC (Arab Region Parliamentarians Against Corruption)
- GOPAC Latina America y el Caribe
- SAPAC (South Asian Parliamentarians Against Corruption)
- SEAPAC (South East Asian Parliamentarians Against Corruption)
- GOPAC Members Non-Affiliated to Regional Chapters

Indonesia sebagai Negara ASEAN secara otomatis tergabung dalam SEAPAC dan menghadiri Sidang SEAPAC. Pertemuan SEAPAC dihadiri perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Thailand dan Filipina.

Agenda SEAPAC mencakup:

- Statement by the SEAPAC President
- SEAPAC Report/updates
- Election of members of the Board of Directors and Officers of the SEAPAC
- Host Next Meeting
- Endorsement of a Regional Action Plan
- Submission of the Draft Manila Declaration

Hal-hal penting yang perlu dicatat dari hasil pertemuan SEAPAC antara lain:

- Senator Guingona dari Filipina menominasikan Indonesia sebagai Chair SEAPAC dan pencalonan tersebut disetujui oleh Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi next Chair of SEAPAC menggantikan Filipina
- Indonesia menominasikan Thailand untuk menjabat kedua kalinya sebagai Vice President SEAPAC
- Secretary of Treasure dijabat oleh Indonesia yang namanya akan ditetapkan oleh President SEAPAC

Press Conference

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, (F-PD/A-515) juga diundang untuk berpartisipasi dalam *Press Conference* yang diselenggarakan beberapa saat setelah Upacara Penutupan Konferensi GOPAC. Hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Ketua GOPAC yang baru, Senator J. Anggara, mantan Ketua GOPAC, Mr. Naser Al Sane, dan Co-Founder GOPAC, John Williams.

D. Hasil-hasil yang dicapai

Pada akhir penutupan konferensi, GOPAC menyetujui Deklarasi Manila dan mengadopsi 5 Resolusi yaitu Resolusi *Anti-Money Laundering GTF*, Resolusi *Women in Parliament Network GTF*, Resolusi *UN Convention Against Corruption GTF*, Resolusi *Parliamentary Oversight GTF* dan Resolusi *Participation of Civil Society GTF*.

Selain itu, GOPAC menetapkan Senator Edgardo J. Angara (Filipina) sebagai Ketua GOPAC yang baru menggantikan Dr. Naser Al-Sane (Kuwait) untuk jangka waktu 2 tahun dan menetapkan Konferensi ke-6 GOPAC akan diselenggarakan di Azerbaijan tahun 2014. Sedangkan Indonesia mendapatkan kehormatan terpilih menjadi Ketua *SEAPAC (South East Asia Parliamentary Against Corruption)* dan *Secretary of Treasure SEAPAC*. Jabatan Wakil Ketua SEAPAC tetap dipegang Thailand. Melalui keketuaan Indonesia di SEAPAC, maka Indonesia memiliki kewenangan untuk mengajak dan merangkul negara-negara di kawasan untuk memperkuat kerangka hukum baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional serta memastikan bahwa masing-masing negara anggota SEAPAC mendirikan National Chapter GOPAC dan anggota parlemen mendapatkan berbagai pelatihan dan pengetahuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya pemberantasan korupsi.

E. Lain-Lain

Selain menghadiri Konferensi GOPAC, Delegasi DPR-RI juga menghadiri acara-acara social functions, baik yang diselenggarakan oleh Panitia tuan rumah maupun oleh KBRI Manila antara lain:

1. Pertemuan Ramah Tamah Dengan Masyarakat Indonesia di Filipina

Acara Embassy Night merupakan salah satu rangkaian acara Sidang ke-5 GOPAC. Delegasi DPR-RI memanfaatkan acara tersebut untuk melakukan pertemuan ramah tamah dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Filipina. Acara diselenggarakan oleh Duta Besar LB & BP RI untuk Filipina pada tanggal 31 Januari 2013 di KBRI Manila.



Duta Besar LB & BP RI, H.E. Mr. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo menerima kunjungan Delegasi DPR-RI yang dipimpin oleh H. Hayono Isman, SIP di Wisma KBRI Manila



Foto bersama Delegasi DPR-RI di Wisma KBRI Manila

Dalam sambutannya Duta Besar LB & BP RI, H.E. Mr. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, menyampaikan optimisme akan kehadiran DPR-RI dalam Sidang ke-5 GOPAC mengingat Indonesia sedang menghadapi masalah pemberantasan korupsi. Disampaikan pula bahwa Filipina mengagumi langkah-langkah Indonesia dalam

menyelesaikan masalah korupsi sehingga diharapkan dapat berbagi pengalaman dalam upaya-upaya meningkatkan kerjasama pemberantasan korupsi tidak hanya yang terjadi di dalam pemerintah namun juga dalam parlemen.

2. **Tournament Golf**

Sebagai salah satu bentuk keramahan dalam menyambut kedatangan para Delegasi, Panitia Sidang ke-5 GOPAC menyelenggarakan tournament golf yang dapat diikuti oleh peserta secara gratis.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konferensi ke-5 GOPAC tanggal 29 Januari 2013 – 3 Februari 2013 di Manila – Filipina telah berlangsung dengan lancar dan sukses
2. Konferensi ke-5 GOPAC telah berhasil mengadopsi Resolusi GOPAC Global Task Force dan Deklarasi Manila yang memuat ketetapan para Anggota GOPAC untuk memerangi dan memberantas korupsi
3. Konferensi ke-6 GOPAC Tahun 2014 akan diselenggarakan di Azerbaijan
4. Pada Pertemuan SEAPAC disepakati bahwa Indonesia ditunjuk sebagai Ketua SEAPAC dan Wakil Ketua SEAPAC tetap dipegang oleh Thailand sedangkan *Secretary of Treasure* dipegang oleh Indonesia yang namanya akan ditunjuk oleh Ketua SEAPAC.
5. Indonesia akan menjadi tuan rumah SEAPAC tahun 2013

B. Saran

1. Pada pengiriman Delegasi DPR-RI ke Konferensi ke-6 GOPAC Tahun 2014 di Azerbaijan sebaiknya mengikutsertakan beberapa Anggota Gugus Nasional GOPAC/SEAPAC yang telah terbentuk tanggal 12 Desember 2012 di Jakarta
2. Mengingat Ibu Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE, telah menjadi Anggota Tetap GOPAC sebaiknya selalu diikutsertakan dalam Delegasi DPR-RI yang akan menghadiri Konferensi GOPAC dan pertemuan-pertemuan lainnya yang disponsori GOPAC maupun Sidang SEAPAC.
3. Mengingat topik Anti-Korupsi merupakan bidang tugas dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) maka sebaiknya unsur BAKN juga dimasukkan dalam Delegasi DPR-RI yang akan menghadiri Konferensi GOPAC dan pertemuan-pertemuan lainnya yang disponsori GOPAC maupun Sidang SEAPAC.

IV. PENUTUP

A. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Duta Besar LB & BP RI untuk Republik Filipina beserta jajarannya di KBRI Manila atas segala bantuan dan dukungannya baik dari segi teknis maupun segi substansi terhadap Delegasi DPR-RI selama mengikuti Konferensi ke-5 GOPAC sehingga misi Delegasi DPR-RI dapat berjalan lancar dan tercapai seperti yang diharapkan.

B. Keterangan tentang Lampiran

Lampiran merupakan dokumen yang didistribusikan kepada para peserta selama Konferensi ke-5 GOPAC berlangsung. Daftar Lampiran sebagaimana terlampir.

C. Kata Penutup

Demikian Laporan Delegasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Diharapkan isi dari Laporan Delegasi ini dapat menjadi masukan/acuan bagi Delegasi DPR-RI yang akan datang dan bagi Komisi-Komisi terkait di DPR-RI dalam melakukan rapat-rapat internal maupun rapat-rapat dengan instansi terkait.

Jakarta, Februari 2013

a.n. DELEGASI
KETUA DELEGASI/PELAPOR,

TTD

H. HAYONO ISMAN, SIP
A-450